



Telusur Anggaran Ala Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan seluruh lurah, camat, dan wali kota di Jakarta. Mereka diminta memilih salah satu dari dua dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mereka setuju. "Ini angket versi Ahok," kata dia di Balai Kota, kemarin.

Rara pejabat di wilayah Ibu Kota tersebut, menurut Ahok, harus menandai anggaran yang sesuai dengan yang diajukan, apakah ada di dokumen APBD versi pemerintah DKI atau dewan perwakilan rakyat daerah. Cara ini, kata dia, untuk memetakan program dengan jelas. Tidak tertutup kemungkinan program itu tak hanya disisipkan oleh DPRD, tapi juga oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ahok meminta mereka mengamati program-program yang ada di kedua dokumen anggaran tersebut. Semua peserta pengarahan kemudian terlihat sibuk meneliti setiap mata anggaran yang ada di dua dokumen APBD tersebut. Beberapa di antaranya ada yang duduk di lantai panggung sebelah podium tempat Ahok berdiri. Sambil memegang pulpen, mereka tampak teliti mengamati kedua anggaran secara bolak-balik dan menandai program yang tak pernah diusulkan.

Camat Cengkareng, Ali Maulana Hakim, mengatakan bahwa, di wilayahnya, pagu anggaran pada versi APBD yang disusun Dewan meningkat menjadi Rp 9 miliar, dari Rp 6,5 miliar yang dianggarkan. Contoh kegiatannya adalah pembangunan gapura ornamen Betawi di kantor Kecamatan Cengkareng senilai Rp 190 juta. "Kami tak pernah mengusulkan," kata Ali.

Setelah menandai semua anggaran, seluruh peserta

harus menandatangani surat pernyataan persetujuan anggaran, kemudian diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.

● LINDA HAIRANI